



Antara Patriarki Budaya dan Partisipasi Gerejawi: Kepemimpinan Perempuan dalam Komunitas Katolik Manggarai

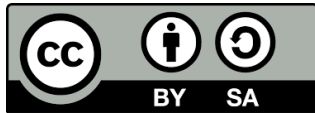
Agustinus Manfred Habur*, Yohana Baptista Jemini

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, Indonesia

Email: agustinusmanfred@gmail.com*, jeminiyohanabaptista@gmail.com

Keywords:

Women's Agency; Manggarai Culture, Women's Leadership; Cultural-Ecclesial Negotiation; Ecclesial Participation.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Publikasiku Publisher

Kata Kunci:

Agensi Perempuan; Budaya Manggarai; Kepemimpinan Perempuan; Negosiasi Budaya-Gerejawi; Partisipasi Gerejawi.

Abstract

Women's leadership within Catholic communities evolves through the intersection of cultural gender expectations and the sphere of ecclesial participation. This study analyzes how Manggarai Catholic women negotiate patriarchal patterns through their participation and leadership practices at St. Anthony of Padua Parish, Mbeling, in the Diocese of Ruteng. The study employs a qualitative approach with a case study design. Data were gathered through interviews with ten informants, observations of pastoral activities and Parish Pastoral Council meetings, and document analysis, followed by thematic analysis. The results indicate that patriarchal gender expectations still influence the construction of leadership; however, women demonstrate high levels of pastoral participation and effective leadership, particularly at the level of Basic Ecclesial Communities and mission stations (stasi). Nevertheless, factors such as formal representation, communication dynamics, domestic burdens, and limited leadership training continue to constrain the expansion of their roles. This study proposes the concept of transformative cultural-ecclesial negotiation characterized by grassroots ecclesial agency as a process wherein women establish leadership legitimacy through community service, moving toward a more participatory and synodal Church.

Abstrak

Kepemimpinan perempuan dalam komunitas Katolik berkembang dalam pertemuan antara ekspektasi gender budaya dan ruang partisipasi gerejawi. Penelitian ini menganalisis bagaimana perempuan Katolik Manggarai menegosiasikan pola patriarkal melalui partisipasi dan praktik kepemimpinan di Paroki Santu Antonius Padua Mbeling, Keuskupan Ruteng. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara terhadap sepuluh narasumber, observasi kegiatan pastoral dan rapat Dewan Pastoral Paroki, serta studi dokumen, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi gender patriarkal masih memengaruhi konstruksi kepemimpinan, tetapi perempuan memiliki partisipasi pastoral yang tinggi dan menunjukkan kepemimpinan efektif terutama pada tingkat Komunitas Basis Gerejani dan stasi. Namun, keterwakilan formal, dinamika komunikasi, beban domestik, dan terbatasnya pembentukan kepemimpinan masih membatasi perluasan peran mereka. Penelitian ini

mengusulkan konsep negosiasi budaya-gerejawi transformatif, dengan agensi gerejawi akar rumput sebagai proses ketika perempuan membangun legitimasi kepemimpinan melalui pelayanan komunitas menuju Gereja yang lebih partisipatif dan sinodal.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan perempuan tetap menjadi salah satu isu penting dalam perkembangan kehidupan sosial dan keagamaan kontemporer. Meskipun keterlibatan perempuan dalam pendidikan, pelayanan sosial, kehidupan komunitas, dan aktivitas keagamaan semakin luas, peningkatan partisipasi tersebut tidak selalu diikuti oleh keterwakilan yang seimbang dalam struktur kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Dalam komunitas keagamaan, persoalan ini menjadi semakin kompleks karena kepemimpinan perempuan berhadapan dengan perjumpaan antara ajaran agama, struktur kelembagaan, konstruksi gender, dan nilai budaya lokal. Studi mutakhir menunjukkan bahwa perempuan sering menjadi aktor utama yang menopang kehidupan komunitas keagamaan, tetapi masih menghadapi hambatan budaya dan struktural ketika memasuki posisi kepemimpinan yang lebih formal (Mahardika & Tanjung, 2024; Tupamahu, 2025; Widyawati et al., 2026). Dalam konteks Gereja Katolik, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan bukan lagi hanya tentang seberapa banyak perempuan berpartisipasi, melainkan bagaimana partisipasi tersebut memperoleh pengakuan dan ruang kepemimpinan yang bermakna.

Perkembangan eklesiologi Katolik sebenarnya memberikan dasar semakin kuat bagi partisipasi seluruh umat beriman. Paus Fransiskus melalui *Evangelii Gaudium* menegaskan pentingnya perluasan ruang bagi kehadiran perempuan secara lebih signifikan dalam Gereja, termasuk dalam berbagai tempat di mana keputusan-keputusan penting dibuat (Francis, 2013). Arah tersebut semakin ditekankan melalui proses sinodal yang menempatkan persekutuan, partisipasi, dan misi sebagai dimensi fundamental kehidupan Gereja (Habur, 2025). Dokumen akhir Sinode menegaskan perlunya pengakuan yang lebih penuh terhadap karisma, panggilan, dan kontribusi perempuan serta perluasan akses mereka kepada tanggung jawab gerejawi (General Secretariat of the Synod, 2024). Perkembangan ini memperlihatkan bahwa sinodalitas tidak cukup diwujudkan dengan kehadiran perempuan dalam kegiatan pastoral, tetapi menuntut relasi, proses mendengarkan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan Gereja. Kajian kontemporer juga menunjukkan bahwa persoalan perempuan telah menjadi salah satu ujian konkret bagi realisasi Gereja sinodal (Brazal, 2024; Eckholt, 2025; Medina, 2025) dan (Bacher Martínez & Cerda-Planas, 2025).

Persoalan tersebut memperoleh kompleksitas tersendiri ketika Gereja hidup di tengah masyarakat yang masih memiliki pola relasi gender yang kuat secara kultural. Kebudayaan bukan sekadar latar belakang kehidupan Gereja, tetapi turut membentuk cara umat memahami otoritas, pembagian peran, relasi laki-laki dan perempuan, serta siapa yang dianggap layak memimpin. Dalam konteks Indonesia, sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa partisipasi perempuan dalam kepemimpinan gerejawi masih berhadapan dengan konstruksi sosial dan budaya yang memberikan legitimasi lebih besar kepada kepemimpinan laki-laki (Mahardika & Tanjung, 2024; Monteiro & Widyawati, 2024; Tupamahu, 2025). Konteks Manggarai menunjukkan dinamika serupa, tetapi tidak dapat direduksi secara sederhana sebagai

kebudayaan yang sepenuhnya patriarkal. Sejumlah kajian menunjukkan adanya unsur-unsur budaya yang menempatkan laki-laki secara lebih dominan dalam ruang publik dan adat, sementara perempuan tetap memiliki posisi simbolik, familial, sosial, dan kultural yang penting (Letsoin et al., 2024; Undat et al., 2025). Karena itu, patriarki dalam konteks Manggarai lebih tepat dibaca sebagai seperangkat ekspektasi gender yang terus dinegosiasikan daripada sebagai karakter tunggal dan statis dari keseluruhan kebudayaan.

Ketegangan tersebut terlihat secara konkret dalam kehidupan Paroki Santu Antonius Padua Mbeling, Keuskupan Ruteng. Data penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam liturgi, katekese, organisasi paroki, kegiatan devosional, dan berbagai program pastoral. Mereka menjadi lektor, pemazmur, anggota koor, fasilitator katekese, anggota organisasi perempuan, serta penggerak kehidupan KBG. Bahkan, kepemimpinan perempuan terlihat kuat pada tingkat KBG dan stasi, tempat mereka mampu mengorganisasi umat, menjalankan program, dan menyelesaikan persoalan komunitas. Namun, situasi berbeda ditemukan pada struktur formal paroki. Dalam struktur DPP periode 2026–2030, dari 51 pengurus hanya 11 orang perempuan dan 40 orang laki-laki; perempuan menduduki beberapa bidang pelayanan, tetapi belum terdapat perempuan yang menjadi ketua atau wakil ketua DPP. Data tersebut memperlihatkan sebuah situasi yang menarik: perempuan sangat hadir dalam kehidupan pastoral dan bahkan telah menjalankan kepemimpinan pada tingkat akar rumput, tetapi kehadiran tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam struktur kepemimpinan formal paroki.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kepemimpinan perempuan dalam Gereja melalui perspektif teologi, kesetaraan gender, kebijakan Gereja, sinodalitas, dan kebudayaan. Mahardika dan Tanjung (2024) mengkritisi berbagai anggapan yang membatasi kepemimpinan perempuan dalam Gereja, sedangkan Monteiro dan Widyawati (2024) menelaah perhatian Paus Fransiskus terhadap peningkatan peran perempuan dalam kehidupan gerejawi. Brazal (2024) menempatkan pengalaman perempuan Asia dalam proses sinodal, sementara Bacher Martínez dan Cerda-Planas (2025) mengkaji hubungan antara sinodalitas, kepemimpinan, dan perempuan pada tingkat Gereja lokal. Pada konteks Manggarai, Widyawati (2024) menjelaskan kompleksitas kedudukan perempuan dalam agama dan budaya lokal, sedangkan Widyawati et al. (2026) mengidentifikasi kesenjangan antara besarnya kontribusi perempuan dan terbatasnya akses terhadap kepemimpinan strategis dalam Gereja Katolik Indonesia. Meskipun memberikan landasan penting, penelitian-penelitian tersebut belum secara memadai menjelaskan bagaimana perempuan pada tingkat paroki pedesaan membangun legitimasi kepemimpinan melalui KBG dan stasi, serta bagaimana pengalaman tersebut digunakan untuk menegosiasikan ekspektasi gender budaya dan batas-batas kelembagaan Gereja.

Kesenjangan tersebut menegaskan urgensi penelitian pada tingkat komunitas lokal karena perubahan kepemimpinan gerejawi tidak hanya berlangsung melalui kebijakan hierarkis, tetapi juga melalui praktik sehari-hari umat. Apabila kepemimpinan hanya dinilai berdasarkan jabatan formal, kapasitas perempuan yang telah berkembang melalui pelayanan, pengorganisasian komunitas, penyelesaian masalah, dan pembentukan konsensus berisiko tidak dikenali. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memandang kepemimpinan perempuan sebagai proses negosiasi budaya-gerejawi yang melibatkan ekspektasi gender budaya, partisipasi pastoral, agensi perempuan, legitimasi komunitas, dan akses terhadap

struktur kepemimpinan. Selain itu, penelitian ini mengembangkan konsep grassroots ecclesial agency untuk menjelaskan bagaimana perempuan membangun pengalaman, pengaruh, dan legitimasi kepemimpinan melalui pelayanan pada tingkat KBG dan stasi. Perspektif tersebut menggeser fokus kajian dari pertanyaan apakah perempuan mampu memimpin menuju analisis mengenai ruang tempat kepemimpinan mereka berkembang, mekanisme yang membentuk pengakuan komunitas, serta kondisi yang mendukung atau membatasi perluasan kepemimpinan tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika kepemimpinan perempuan dalam komunitas Katolik Manggarai dengan memberi perhatian khusus pada pengaruh ekspektasi gender budaya terhadap posisi perempuan, bentuk partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam kehidupan pastoral, serta strategi perempuan dalam menegosiasikan hambatan budaya, familial, relasional, dan organisasional. Penelitian ini juga bertujuan menjelaskan peran KBG dan stasi sebagai ruang pembentukan kepemimpinan perempuan serta hubungan antara pengalaman kepemimpinan akar rumput dan akses terhadap struktur formal paroki. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian gender, kepemimpinan, budaya, dan sinodalitas melalui model negosiasi budaya-gerejawi yang kontekstual. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi Paroki Santu Antonius Padua Mbeling dan Keuskupan Ruteng untuk menyusun program kaderisasi, pelatihan, pendampingan, dan mentoring bagi perempuan serta menciptakan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif. Secara sosial dan pastoral, penelitian ini diharapkan mendorong dialog antara perempuan, laki-laki, keluarga, pemimpin adat, dan pemimpin Gereja dalam membangun komunitas Katolik yang semakin partisipatif, sinodal, dan bertanggung jawab bersama.

METODE PENELITIAN

Desain dan Konteks Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami kepemimpinan perempuan dalam konteks kehidupan konkret komunitas Katolik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian tidak terutama bermaksud mengukur tingkat partisipasi perempuan secara kuantitatif, tetapi memahami pengalaman, pandangan, praktik kepemimpinan, serta interaksi antara ekspektasi budaya dan kehidupan gerejawi sebagaimana dialami oleh para partisipan. Studi kasus memungkinkan suatu fenomena dianalisis secara mendalam dalam konteks sosial dan institusional yang terikat (bounded context), terutama ketika batas antara fenomena yang diteliti dan konteks kehidupan sehari-harinya tidak dapat dipisahkan secara tegas (Creswell & Poth, 2024; Yin, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Paroki Santu Antonius Padua Mbeling, Keuskupan Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur. Paroki ini dipilih karena memperlihatkan dinamika yang relevan dengan fokus penelitian: perempuan memiliki keterlibatan yang tinggi dalam liturgi, katekese, organisasi gerejawi, KBG, stasi, dan berbagai kegiatan pastoral, tetapi keterwakilan mereka dalam struktur kepemimpinan formal paroki masih terbatas. Konteks ini menyediakan ruang empiris untuk memahami bagaimana kepemimpinan perempuan berkembang pada perjumpaan antara kehidupan Gereja Katolik dan ekspektasi gender dalam masyarakat Manggarai. Dengan demikian, paroki diperlakukan bukan sekadar sebagai lokasi penelitian, tetapi sebagai konteks sosial-gerejawi tempat budaya, gender, partisipasi, dan kepemimpinan saling berinteraksi.

Partisipan dan Pemilihan Narasumber

Data penelitian diperoleh dari 10 narasumber yang terdiri atas pastor paroki, anggota Dewan Pastoral Paroki (DPP), anggota Legio Maria, dan umat. Narasumber dipilih secara purposif berdasarkan pengalaman dan keterlibatan mereka dalam kehidupan paroki. Pemilihan tersebut memungkinkan penelitian memperoleh perspektif dari berbagai posisi dalam komunitas, baik dari pemimpin pastoral, pengurus formal paroki, perempuan yang aktif dalam organisasi gerejawi, maupun umat yang mengalami secara langsung dinamika kepemimpinan dan partisipasi perempuan.

Keragaman narasumber penting karena kepemimpinan perempuan dalam penelitian ini tidak dipahami hanya dari perspektif perempuan, tetapi sebagai fenomena relasional yang terbentuk melalui interaksi perempuan dengan pemimpin Gereja, pengurus DPP, laki-laki, keluarga, dan komunitas. Dengan demikian, data memungkinkan perbandingan antara bagaimana perempuan memahami pengalaman partisipasi dan kepemimpinannya dengan bagaimana aktor lain menilai kapasitas, peluang, dan hambatan kepemimpinan perempuan. Identitas seluruh narasumber disamarkan dengan menggunakan inisial untuk menjaga privasi dan kerahasiaan mereka.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui tiga teknik yang saling melengkapi, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan pandangan narasumber mengenai keterlibatan perempuan dalam kehidupan paroki, kondisi kepemimpinan perempuan, pengaruh budaya terhadap pembagian peran gender, pengalaman perempuan dalam forum gerejawi, serta berbagai hambatan yang memengaruhi akses mereka terhadap kepemimpinan. Wawancara juga menghasilkan narasi mengenai pengalaman perempuan memimpin KBG dan stasi, dinamika komunikasi dalam rapat DPP, kepercayaan diri, tanggung jawab keluarga, serta kebutuhan akan pelatihan dan pendampingan kepemimpinan.

Observasi dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan paroki, termasuk rapat DPP dan kegiatan pelayanan pastoral. Observasi memungkinkan peneliti melihat bagaimana partisipasi perempuan berlangsung dalam praktik, bukan hanya berdasarkan penuturan narasumber. Perhatian diberikan pada kehadiran perempuan, bentuk pelayanan yang mereka jalankan, pola komunikasi dalam pertemuan, kesempatan menyampaikan pendapat, dan interaksi antara anggota perempuan dan laki-laki. Studi dokumen digunakan untuk melengkapi kedua sumber tersebut, khususnya dalam memperoleh informasi mengenai struktur organisasi dan komposisi kepengurusan DPP serta data lain yang berkaitan dengan kehidupan pastoral paroki. Penggunaan ketiga sumber tersebut memungkinkan fenomena kepemimpinan perempuan dipahami melalui pengalaman yang diceritakan, praktik yang diamati, dan struktur formal yang terdokumentasi.

Analisis Data

Data dianalisis secara tematik melalui proses membaca kembali keseluruhan data, mengidentifikasi unit-unit makna, mengelompokkan pola yang berulang, membandingkan pengalaman antarpartisipan, dan mengembangkan tema-tema yang berkaitan dengan fokus penelitian. Analisis tematik digunakan secara fleksibel sebagai proses interpretatif untuk menemukan pola makna yang relevan dalam data kualitatif (Braun & Clarke, 2022a, 2022b).

Dalam proses tersebut, perhatian tidak hanya diberikan pada pernyataan eksplisit tentang kepemimpinan perempuan, tetapi juga pada ketegangan antara tingginya keterlibatan pastoral perempuan dan terbatasnya kehadiran mereka dalam beberapa ruang kepemimpinan formal.

Analisis selanjutnya difokuskan pada empat pola utama yang muncul dari data, yaitu (1) ekspektasi gender dalam konstruksi kepemimpinan; (2) tingginya partisipasi perempuan dalam kehidupan pastoral; (3) agensi dan kepemimpinan perempuan pada tingkat KBG dan stasi; serta (4) batas-batas kultural, relasional, familial, dan organisasional terhadap perluasan kepemimpinan perempuan. Keempat pola tersebut kemudian dibaca melalui kerangka ekspektasi gender budaya ↔ agensi perempuan ↔ partisipasi gerejawi yang dikembangkan pada bagian teoretis. Analisis ini memungkinkan penelitian bergerak melampaui deskripsi mengenai apakah perempuan terlibat atau tidak terlibat menuju pemahaman tentang bagaimana perempuan menggunakan ruang gerejawi untuk membangun dan menjalankan kepemimpinan di tengah kondisi budaya dan struktural yang mereka hadapi.

Interpretasi data juga diarahkan pada identifikasi proses negosiasi budaya-gerejawi. Pernyataan mengenai dominasi laki-laki dalam ruang kepemimpinan tidak dibaca secara terpisah dari bukti tentang kuatnya kepemimpinan perempuan pada tingkat akar rumput. Sebaliknya, kedua pola tersebut dibandingkan untuk melihat bagaimana norma gender dapat bertahan dalam satu ruang tetapi mengalami pergeseran dalam ruang lainnya. Dengan cara ini, konsep grassroots ecclesial agency digunakan sebagai kategori interpretatif untuk menjelaskan kapasitas perempuan membangun legitimasi kepemimpinan melalui pengalaman pelayanan dan kepemimpinan komunitas. Konsep tersebut digunakan untuk membaca data, bukan untuk menggantikan suara dan pengalaman partisipan.

Kredibilitas Data dan Pertimbangan Etis

Kredibilitas temuan diperkuat melalui penggunaan beberapa sumber data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumen. Informasi dari wawancara dibandingkan dengan hasil observasi dan data struktural paroki untuk melihat konsistensi maupun perbedaan antarsumber. Misalnya, pernyataan mengenai luasnya keterlibatan perempuan dibandingkan dengan observasi aktivitas pastoral, sedangkan pengalaman mengenai keterbatasan kepemimpinan formal dibaca bersama komposisi kepengurusan DPP. Pendekatan semacam ini membantu menghasilkan interpretasi yang lebih kontekstual dan menghindari kesimpulan yang hanya bergantung pada satu narasumber atau satu jenis data (Creswell & Poth, 2024).

Pertimbangan etis terutama diarahkan pada perlindungan identitas narasumber dan sensitivitas terhadap konteks budaya. Nama narasumber ditampilkan dalam bentuk inisial, dan kutipan wawancara digunakan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas personal. Interpretasi mengenai patriarki juga dilakukan secara hati-hati agar temuan tidak digunakan untuk memberikan karakterisasi tunggal terhadap kebudayaan Manggarai. Pernyataan mengenai pola patriarkal diperlakukan sebagai pengalaman dan persepsi yang muncul dari konteks penelitian, kemudian dianalisis bersama bukti mengenai perubahan, agensi, dan kepemimpinan perempuan. Dengan demikian, penelitian berusaha mempertahankan keseimbangan antara analisis kritis terhadap ketimpangan gender dan penghargaan terhadap kompleksitas kebudayaan lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Analisis data menghasilkan empat tema utama yang menggambarkan dinamika kepemimpinan perempuan dalam komunitas Katolik Manggarai, yaitu: (1) jejak patriarki dalam konstruksi kepemimpinan; (2) perempuan sebagai aktor utama kehidupan pastoral; (3) agensi kepemimpinan perempuan di tingkat KBG dan stasi; dan (4) batas-batas negosiasi budaya-gerejawi. Keempat tema tersebut memperlihatkan bahwa kepemimpinan perempuan berkembang dalam situasi yang tidak sepenuhnya linear. Di satu sisi, ekspektasi gender tertentu masih membatasi ruang kepemimpinan perempuan; di sisi lain, kehidupan gerejawi menyediakan ruang yang memungkinkan perempuan membangun pengalaman, legitimasi, dan praktik kepemimpinan konkret.

Jejak Patriarki dalam Konstruksi Kepemimpinan

Data menunjukkan bahwa ekspektasi gender dalam konteks budaya lokal masih memengaruhi cara sebagian umat memahami kepemimpinan. Kepemimpinan publik dan pengambilan keputusan cenderung lebih mudah diasosiasikan dengan laki-laki, terutama karena pola tersebut telah lama ditemukan dalam sejumlah ruang kehidupan adat. Pastor paroki menggambarkan situasi tersebut sebagai pola pikir yang masih perlu diubah:

“Selama ini yang menjadi tantangan itu adalah bagaimana mengubah pandangan biasanya kalau di dalam budaya Manggarai itu semua hal itu dipimpin oleh laki-laki dan ini juga membentuk semacam pola dimana harus laki-laki yang berbicara, harus laki-laki yang mengambil keputusan.” (PP)

Pengalaman serupa disampaikan M.L., yang melihat masih adanya cara pandang sebagian umat yang menganggap kepemimpinan sebagai ruang yang lebih dekat dengan laki-laki. K.J. juga menunjuk dominasi laki-laki dalam posisi adat seperti Tu’a Golo dan Tu’a Teno. Temuan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi kepemimpinan dalam komunitas gerejawi tidak sepenuhnya terpisah dari pengalaman sosial-budaya umat. Pola mengenai siapa yang biasa berbicara, memimpin, dan mengambil keputusan dalam kehidupan sosial dapat terbawa ke dalam cara umat membayangkan kepemimpinan di lingkungan Gereja.

Namun, data tidak menunjukkan penolakan mutlak terhadap kepemimpinan perempuan. Pastor paroki justru menegaskan bahwa perempuan terus didorong untuk “menyuarakan, ikut berpikir, ikut juga memberikan usulan, saran, dan juga kritik” bagi perkembangan paroki (PP). Karena itu, jejak patriarki yang ditemukan lebih tepat dipahami sebagai ekspektasi gender yang masih memengaruhi legitimasi kepemimpinan, bukan sebagai sistem yang sepenuhnya menutup ruang perempuan. Di dalam ketegangan inilah perubahan mulai terlihat: pola kepemimpinan yang secara kultural lebih dekat dengan laki-laki berhadapan dengan praktik gerejawi yang semakin membuka ruang partisipasi perempuan.

Perempuan sebagai Aktor Utama Kehidupan Pastoral

Berbeda dengan keterbatasan tersebut, perempuan menunjukkan tingkat keterlibatan yang sangat tinggi dalam kehidupan pastoral. Mereka aktif dalam pelayanan liturgi, katekese, koor, organisasi gerejawi, doa dan kegiatan KBG, serta berbagai program pastoral. Observasi terhadap perayaan liturgi juga menunjukkan kuatnya kehadiran perempuan. I.A., seorang perempuan yang aktif dalam pelayanan liturgi, menggambarkan pengalaman tersebut: “Kami perempuan yang sangat aktif dalam pelayanan liturgi. Hampir setiap minggu ada perempuan

yang menjadi lektor, pemazmur, dan anggota kor lebih banyak kami yang perempuan. Jumlah kehadiran dalam perayaan Ekaristi lebih banyak perempuan.” (I.A.)

Penilaian tersebut diperkuat oleh Y.F.J. yang menyatakan bahwa kontribusi perempuan dalam kehidupan paroki sangat besar. Menurutnya, “pelayanan di gereja soal liturgi itu 85% itu perempuan,” sedangkan dalam kegiatan KBG perempuan aktif dalam doa rosario, katekese, dan perayaan Ekaristi (Y.F.J.). Perempuan juga terlibat sebagai fasilitator katekese, termasuk dalam menyampaikan bahan katekese yang berasal dari keuskupan maupun program paroki. Dengan demikian, perempuan tidak hanya hadir sebagai penerima pelayanan, tetapi menjadi pelaku yang menopang keberlangsungan berbagai aktivitas pastoral.

Tingginya keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan gerejawi telah menyediakan ruang penting bagi perempuan untuk mengembangkan pengalaman pelayanan, kemampuan berorganisasi, komunikasi, dan tanggung jawab komunitas. Partisipasi perempuan karena itu tidak dapat dipahami sekadar sebagai kehadiran numerik. Melalui pelayanan yang dilakukan secara terus-menerus, perempuan membangun pengetahuan pastoral dan memperoleh kepercayaan komunitas. Temuan ini memperlihatkan pergeseran penting: perempuan yang dalam konstruksi kepemimpinan tertentu masih menghadapi batas gender justru tampil sebagai aktor utama dalam praktik kehidupan gerejawi sehari-hari.

Dari Partisipasi menuju Agensi Kepemimpinan di KBG dan Stasi

Data yang paling menonjol ditemukan pada tingkat KBG dan stasi. Pada kedua ruang tersebut, keterlibatan perempuan telah bergerak melampaui pelayanan menuju praktik kepemimpinan. Beberapa stasi dipimpin oleh perempuan, sementara perempuan juga terlibat secara aktif dalam kepengurusan KBG. Mereka mengorganisasi kegiatan, menggerakkan anggota komunitas, menjalankan program, dan menangani persoalan yang muncul dalam kehidupan umat. C.K.A. menilai kepemimpinan tersebut secara sangat positif: “Ketua stasi dan KBG perempuan di paroki kami sangat aktif dan efektif. Mereka bisa menggerakkan umat, menyelesaikan masalah, dan menjalankan program dengan baik. Mereka adalah bukti nyata bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin yang baik.” (C.K.A.)

K.J. memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai kemampuan perempuan mengorganisasi umat. Menurutnya, KBG yang dipimpin perempuan menunjukkan keaktifan anggota yang tinggi: “KBG di paroki kita yang diketuai oleh perempuan terlihat dari keaktifan umatnya. KBG yang diketuai oleh perempuan cara mereka mengorganisir umat di KBG itu sangat baik.” (K.J.). Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa perempuan telah memperoleh legitimasi kepemimpinan melalui praktik. Kemampuan memimpin tidak pertama-tama muncul karena mereka menduduki jabatan formal pada tingkat paroki, tetapi berkembang melalui pelayanan langsung dan hubungan sehari-hari dengan komunitas. KBG dan stasi dengan demikian menjadi ruang tempat perempuan mengubah partisipasi pastoral menjadi pengalaman kepemimpinan konkret. Mereka memperoleh kepercayaan bukan semata-mata berdasarkan status, melainkan karena kemampuan mengorganisasi, menggerakkan, mendampingi, dan mempertahankan keterlibatan umat.

Temuan ini memperlihatkan bentuk agensi gerejawi akar rumput. Perempuan tidak hanya menunggu perubahan struktur atau pemberian posisi dari atas, tetapi telah menggunakan ruang pastoral yang tersedia untuk menjalankan kepemimpinan dari bawah. Dengan demikian, data memperlihatkan sebuah pergeseran dari kehadiran → partisipasi → tanggung jawab →

kepemimpinan komunitas. KBG dan stasi menjadi ruang penting tempat batas-batas gender yang masih ditemukan dalam konstruksi kepemimpinan formal mulai dinegosiasikan melalui pengalaman nyata bahwa perempuan mampu memimpin secara efektif.

Batas-Batas Negosiasi Budaya-Gerejawi

Meskipun agensi perempuan berkembang kuat pada tingkat akar rumput, perubahan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam struktur kepemimpinan formal paroki. Struktur DPP periode 2026–2030 terdiri atas 51 pengurus, yaitu 40 laki-laki dan 11 perempuan. Perempuan menempati posisi sekretaris serta beberapa bidang seperti liturgi, koor, dan dekorasi, tetapi belum ada perempuan yang menjadi ketua atau wakil ketua DPP. Data ini memperlihatkan bahwa peningkatan partisipasi dan keberhasilan perempuan memimpin komunitas belum secara otomatis menghasilkan keterwakilan yang seimbang dalam struktur formal.

Keterbatasan juga terlihat dalam dinamika komunikasi pada rapat DPP. Perempuan secara formal diberi kesempatan untuk berbicara dan pendapat mereka didengarkan. Namun, kesempatan tersebut belum selalu menghasilkan keberanian yang sama dalam menyampaikan pandangan yang berbeda. H.D.E. menjelaskan: “Perempuan memang diberi kesempatan berbicara dalam rapat, tapi kadang kami ragu untuk menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan pendapat dari anggota laki-laki, kami lebih sering mendukung usulan yang sudah ada daripada mengusulkan hal yang baru.” (H.D.E.)

Hasil observasi rapat memperkuat pernyataan tersebut. Meskipun perempuan hadir, menyampaikan pendapat, dan didengarkan, laki-laki lebih sering berbicara dan membuka pembicaraan. Perempuan cenderung menyampaikan pendapat ketika diminta atau ketika pembahasan berhubungan langsung dengan bidang pelayanan mereka. Dengan demikian, ruang partisipasi formal memang telah terbuka, tetapi ruang untuk berbicara belum selalu identik dengan keberanian dan pengaruh yang setara dalam proses deliberasi.

Batas lain berasal dari pertemuan antara tanggung jawab keluarga dan tuntutan organisasi gerejawi. B.M. menggambarkan pengalaman perempuan yang harus membagi waktu antara keluarga, pekerjaan, dan pelayanan:

“Sebagai perempuan, kami punya banyak tanggung jawab. Di rumah harus mengurus suami dan anak, di kebun harus bekerja, di gereja juga mau melayani. Kadang waktu dan tenaga tidak cukup untuk semua itu. Makanya kami kadang harus memilih, dan yang kami pilih biasanya keluarga dulu.” (B.M.)

Persoalan tersebut semakin terasa karena beberapa rapat DPP berlangsung pada malam hari, berpindah tempat, dan terkadang berjarak cukup jauh. E.D. mengakui bahwa kondisi tersebut membuatnya tidak selalu dapat menghadiri pertemuan karena tanggung jawab rumah tangga dan pengasuhan. Hambatan ini menunjukkan bahwa akses terhadap kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh keterbukaan institusi, tetapi juga oleh kondisi praktis yang memungkinkan atau membatasi perempuan menggunakan kesempatan tersebut.

Keterbatasan lainnya adalah belum adanya sistem mentoring dan pembentukan kepemimpinan perempuan yang terstruktur. Data penelitian menunjukkan bahwa paroki telah melibatkan perempuan dalam berbagai kegiatan, termasuk sebagai fasilitator katekese, tetapi belum tersedia program khusus untuk pelatihan kepemimpinan, mentoring, atau kaderisasi perempuan secara sistematis. Akibatnya, pengalaman kepemimpinan yang telah berkembang

di KBG dan stasi belum mempunyai jalur yang terencana untuk berkembang menuju tanggung jawab yang lebih luas pada tingkat paroki.

Keempat kondisi tersebut—keterwakilan formal yang terbatas, pola komunikasi, beban keluarga, dan kurangnya pembentukan kepemimpinan—menunjukkan batas-batas negosiasi budaya-gerejawi. Gereja lokal telah membuka ruang yang memungkinkan perempuan hadir, melayani, berbicara, bahkan memimpin komunitas, tetapi pola budaya, kondisi keluarga, dan praktik organisasi masih memengaruhi sejauh mana ruang tersebut dapat digunakan. Negosiasi yang terjadi karena itu belum menghasilkan transformasi yang sepenuhnya selesai.

Secara keseluruhan, keempat tema memperlihatkan sebuah proses yang bergerak dari ekspektasi gender budaya → partisipasi gerejawi → agensi perempuan → kepemimpinan akar rumput → negosiasi menuju kepemimpinan yang lebih luas. Temuan terpenting penelitian ini bukan semata-mata bahwa perempuan menghadapi patriarki atau bahwa perempuan aktif dalam Gereja, tetapi bahwa partisipasi gerejawi telah menjadi salah satu ruang tempat perempuan Katolik Manggarai menegosiasikan batas-batas gender dan membangun legitimasi kepemimpinan melalui praktik konkret. Namun, proses tersebut masih berlangsung dan belum sepenuhnya mengubah struktur kepemimpinan formal. Dengan demikian, kepemimpinan perempuan dalam komunitas Katolik Manggarai memperlihatkan proses transformasi yang tumbuh dari akar rumput, tetapi masih berhadapan dengan batas-batas kultural, relasional, familial, dan organisasional.

Patriarki sebagai Pola yang Dinegosiasikan, Bukan Realitas Budaya yang Statis

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam komunitas Katolik Manggarai masih berhadapan dengan ekspektasi gender yang mengasosiasikan otoritas publik, kemampuan berbicara, dan pengambilan keputusan dengan laki-laki. Pola tersebut terlihat dalam pengalaman kehidupan adat maupun dalam persepsi sebagian umat mengenai siapa yang dianggap lebih wajar menjadi pemimpin. Temuan ini sejalan dengan penelitian tentang perempuan Manggarai yang menunjukkan bahwa praktik sosial kontemporer masih memperlihatkan ketimpangan gender dan pengaruh pola patriarkal terhadap posisi perempuan (Letsoin et al., 2024). Dalam konteks yang lebih luas, kepemimpinan perempuan juga sering berhadapan dengan konstruksi sosial yang menghubungkan kepemimpinan dengan karakteristik maskulin dan menghasilkan hambatan yang tidak selalu tampak sebagai larangan formal (Buss et al., 2025). Karena itu, terbatasnya perempuan dalam kepemimpinan tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan kemampuan individual, tetapi perlu ditempatkan dalam lingkungan sosial yang membentuk legitimasi kepemimpinan.

Namun, hasil penelitian ini sekaligus mengingatkan bahwa hubungan antara kebudayaan Manggarai dan patriarki tidak dapat dibaca secara simplistik. Kajian Widyawati (2024) justru menunjukkan bahwa kebudayaan Manggarai memiliki simbol-simbol yang memberikan penghargaan tinggi kepada perempuan sebagai Iné (sumber kehidupan), Siri Bongkok (tiang utama), dan ata pé'ang (pembawa kehidupan ke luar komunitas). Perspektif tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan Manggarai mengandung sumber simbolik yang dapat mendukung martabat dan agensi perempuan, sekalipun praktik sosial kontemporer memperlihatkan ketimpangan gender. Demikian pula, kajian terhadap ritus Roko Molas Poco menemukan bahwa simbol feminitas memiliki kedudukan penting dalam kosmologi dan kehidupan budaya Manggarai (Letsoin et al., 2024). Dengan demikian, budaya lokal

mengandung ketegangan internal antara praktik patriarkal dan simbol-simbol penghargaan terhadap perempuan.

Temuan penelitian ini karena itu lebih tepat dibaca sebagai negosiasi terhadap ekspektasi gender patriarkal dalam konteks budaya Manggarai, bukan sebagai perlawanan terhadap kebudayaan Manggarai itu sendiri. Perubahan kepemimpinan perempuan tidak mengharuskan perempuan melepaskan identitas budaya, tetapi membuka kemungkinan untuk menemukan kembali nilai-nilai budaya yang mendukung martabat, kehidupan, kebersamaan, dan kontribusi perempuan. Perspektif ini penting karena transformasi gender yang berakar secara lokal akan lebih berkelanjutan ketika tidak hanya mengkritik unsur budaya yang membatasi perempuan, tetapi juga mengaktifkan kembali sumber-sumber budaya yang memberikan legitimasi terhadap keberadaan dan kepemimpinan mereka. Patriarki dengan demikian dipahami sebagai pola sosial yang dapat dinegosiasikan dan ditransformasikan, bukan sebagai esensi kebudayaan Manggarai.

Gereja sebagai Ruang Reproduksi sekaligus Transformasi Gender

Temuan penelitian memperlihatkan sebuah paradoks gerejawi. Perempuan merupakan aktor utama dalam liturgi, katekese, organisasi, KBG, dan berbagai pelayanan pastoral, tetapi representasi mereka dalam kepemimpinan formal masih jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki. Pola ini sejalan dengan penelitian terbaru mengenai kepemimpinan perempuan Katolik di Indonesia. Widyawati et al. (2026) menemukan bahwa perempuan telah menjalankan berbagai fungsi kepemimpinan pada tingkat keuskupan dan paroki, tetapi norma patriarkal dan pola kepemimpinan yang masih kuat dapat membatasi akses mereka terhadap posisi strategis. Studi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan fungsional perempuan tidak dengan sendirinya menghasilkan keterwakilan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Temuan Mbeling memberikan gambaran mikro mengenai dinamika tersebut pada tingkat paroki.

Pada saat yang sama, kehidupan Gereja justru menyediakan ruang yang memungkinkan perempuan melampaui sebagian batas gender yang mereka alami dalam kehidupan sosial. Pelayanan liturgi, katekese, organisasi, KBG, dan stasi memberi perempuan kesempatan untuk berbicara, mengorganisasi, mengajar, mendampingi, dan memimpin. Perkembangan ini konsisten dengan arah Magisterium Gereja yang semakin menegaskan partisipasi seluruh umat beriman. *Spiritus Domini* membuka pelayanan lektor dan akolit yang dilantik bagi perempuan, sedangkan *Antiquum Ministerium* menegaskan pelayanan katekis sebagai pelayanan gerejawi yang stabil dan penting bagi misi Gereja (Francis, 2021a, 2021b). Proses sinodal kemudian memperluas perspektif tersebut dengan menempatkan partisipasi bukan sekadar sebagai pembagian tugas, tetapi sebagai keterlibatan umat dalam proses mendengarkan, discernment, dan tanggung jawab bersama (General Secretariat of the Synod, 2023, 2024).

Karena itu, Gereja lokal dapat menjadi ruang reproduksi sekaligus transformasi gender. Pola sosial yang lebih mengutamakan laki-laki sebagai pemimpin dapat terbawa masuk ke dalam struktur gerejawi, tetapi pengalaman pastoral pada saat yang sama dapat menghasilkan praktik alternatif yang menunjukkan kemampuan perempuan memimpin. Studi internasional mengenai perempuan dan sinodalitas juga menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap partisipasi perempuan belum selalu diikuti oleh transformasi struktur dan proses pengambilan keputusan (Bacher Martínez & Cerda-Planas, 2025; Eckholt, 2025; Medina, 2025). Persoalan mendasarnya karena itu bukan lagi sekadar apakah Gereja memberikan ruang kepada

perempuan, melainkan jenis ruang apa yang diberikan, bagaimana ruang itu digunakan, dan apakah pengalaman yang terbentuk di dalamnya dapat berkembang menjadi legitimasi kepemimpinan yang lebih luas.

Temuan Mbeling memperlihatkan bahwa transformasi tersebut telah dimulai tetapi belum selesai. Perempuan telah memperoleh ruang pastoral yang cukup luas, tetapi pola komunikasi dalam rapat, komposisi kepemimpinan formal, pembagian tanggung jawab keluarga, dan belum adanya kaderisasi sistematis masih membatasi perkembangan kepemimpinan mereka. Kondisi ini menegaskan bahwa Gereja sinodal tidak cukup dibangun dengan mengundang perempuan hadir. Dokumen Akhir Sinode menegaskan perlunya pengakuan yang lebih penuh terhadap karisma, panggilan, dan kontribusi perempuan serta keterlibatan mereka dalam tanggung jawab gerejawi (General Secretariat of the Synod, 2024). Dengan demikian, pergeseran yang dibutuhkan adalah dari ruang untuk hadir menuju ruang untuk berkontribusi, dari ruang untuk melayani menuju ruang untuk memimpin, dan dari kesempatan berbicara menuju partisipasi yang sungguh berpengaruh.

KBG dan Stasi sebagai Ruang Agensi Gerejawi Akar Rumput

Salah satu kontribusi terpenting penelitian ini adalah temuan bahwa kepemimpinan perempuan justru berkembang secara nyata pada tingkat KBG dan stasi. Perempuan yang memimpin komunitas tersebut mampu mengorganisasi umat, membangun partisipasi, menyelesaikan persoalan, dan menjalankan program pastoral. Temuan ini menggeser pertanyaan dari “apakah perempuan mampu memimpin?” menuju “di ruang mana kemampuan kepemimpinan perempuan telah berkembang dan memperoleh pengakuan?” Pergeseran tersebut penting karena penelitian mengenai kepemimpinan perempuan sering berfokus pada keterwakilan dalam jabatan formal, sementara praktik kepemimpinan yang berkembang pada tingkat komunitas kurang mendapat perhatian. Literatur kepemimpinan kontemporer menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan tidak selalu mengikuti jalur hierarkis dan linear, tetapi dapat berkembang melalui pengalaman relasional, jaringan, pembelajaran, dan praktik komunitas (Buss et al., 2025).

KBG dan stasi dalam konteks penelitian ini berfungsi sebagai ruang pembentukan kepemimpinan. Kedekatan dengan kehidupan keluarga dan umat memungkinkan perempuan memperoleh pengalaman konkret dalam mengorganisasi kegiatan, berkomunikasi, menyelesaikan masalah, membangun konsensus, dan menjaga keterlibatan komunitas. Otoritas yang terbentuk dalam ruang tersebut tidak terutama berasal dari posisi hierarkis, tetapi dari kepercayaan yang dibangun melalui pelayanan dan efektivitas kepemimpinan. Karena itu, kepemimpinan perempuan di tingkat akar rumput dapat dipahami sebagai bentuk *grassroots ecclesial agency*: kemampuan perempuan menggunakan ruang pastoral komunitas untuk membangun pengalaman, legitimasi, dan pengaruh gerejawi.

Konsep tersebut memperluas diskusi mengenai kepemimpinan perempuan Katolik di Indonesia. Studi Widyawati et al. (2026) menunjukkan adanya ketimpangan antara keterlibatan perempuan dan akses terhadap posisi kepemimpinan strategis. Temuan penelitian ini melengkapi gambaran tersebut dengan menunjukkan bahwa di bawah struktur formal terdapat cadangan kepemimpinan perempuan yang telah hidup dan berfungsi secara efektif. Artinya, tantangan Gereja lokal bukan pertama-tama menciptakan kepemimpinan perempuan dari titik

nol, tetapi mengenali, mendampingi, dan menghubungkan pengalaman kepemimpinan yang telah berkembang pada tingkat akar rumput dengan struktur kepemimpinan yang lebih luas.

Implikasinya cukup penting bagi pengembangan Gereja sinodal. Jika sinodalitas mengandaikan partisipasi dan tanggung jawab bersama seluruh umat yang dibaptis, KBG dan stasi dapat menjadi ruang pembelajaran sinodal yang konkret. Di sana kepemimpinan berkembang melalui kedekatan, mendengarkan, koordinasi, pelayanan, dan tanggung jawab bersama, bukan semata-mata melalui jabatan. Karena itu, pengalaman perempuan di KBG dan stasi perlu dipandang sebagai jalur pembentukan kepemimpinan gerejawi, bukan sebagai titik akhir pelayanan perempuan. Pendampingan, pelatihan, mentoring, dan mekanisme kaderisasi dapat menghubungkan pengalaman tersebut dengan kepemimpinan tingkat paroki sehingga agensi yang tumbuh dari bawah memperoleh peluang untuk berkontribusi lebih luas.

Batas Negosiasi: Dari Kesempatan Berpartisipasi menuju Kapasitas untuk Memengaruhi

Meskipun kehidupan pastoral menyediakan ruang bagi agensi perempuan, penelitian ini menunjukkan bahwa negosiasi budaya-gerejawi memiliki batas. Perempuan diberi kesempatan berbicara dalam rapat DPP dan pandangan mereka didengarkan, tetapi sebagian masih ragu menyampaikan pendapat yang berbeda dari laki-laki. Situasi tersebut memperlihatkan perbedaan penting antara akses formal terhadap ruang partisipasi dan kapasitas substantif untuk menggunakan ruang tersebut. Kesempatan berbicara belum tentu menghasilkan keberanian mengajukan agenda baru, mempertanyakan pandangan dominan, atau memengaruhi arah keputusan. Temuan ini beririsan dengan kajian tentang perempuan dalam Gereja sinodal yang menekankan bahwa partisipasi yang bermakna membutuhkan lebih dari kehadiran; ia membutuhkan pengakuan terhadap suara, pengalaman, dan kapasitas perempuan dalam proses deliberasi gerejawi (Bacher Martínez & Cerda-Planas, 2025; Eckholt, 2025; Medina, 2025).

Hambatan tersebut tidak seharusnya dijelaskan sebagai kurangnya kepercayaan diri perempuan semata. Keraguan untuk berbicara berkembang dalam lingkungan relasional yang telah lama membentuk ekspektasi tentang laki-laki sebagai pemegang otoritas. Demikian pula, beban domestik tidak dapat direduksi menjadi persoalan manajemen waktu individual. Ketika perempuan tetap menjadi penanggung jawab utama rumah tangga dan pengasuhan, sementara pertemuan organisasi berlangsung pada malam hari, jauh dari rumah, atau hingga larut, struktur organisasi yang tampak netral dapat menghasilkan dampak yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, akses terhadap kepemimpinan dibentuk oleh interaksi antara budaya, relasi gender, keluarga, kepercayaan diri, dan praktik organisasi.

Temuan tersebut menuntut strategi pemberdayaan yang lebih komprehensif. Pelatihan kepemimpinan memang penting, tetapi tidak memadai apabila tidak disertai perubahan lingkungan yang memungkinkan perempuan menggunakan kapasitas tersebut. Gereja lokal perlu membangun budaya rapat yang lebih deliberatif, mekanisme kaderisasi yang terbuka, mentoring bagi perempuan yang telah menunjukkan kapasitas di KBG dan stasi, serta pengaturan kegiatan yang mempertimbangkan tanggung jawab keluarga. Pada saat yang sama, laki-laki dan keluarga perlu dilibatkan karena transformasi kepemimpinan perempuan bukan proyek perempuan semata, tetapi perubahan pola relasi komunitas. Visi sinodal tentang *co-responsibility* memberikan dasar eklesiologis bagi perubahan semacam ini karena tanggung

jawab misi dipahami sebagai tanggung jawab bersama seluruh umat Allah (General Secretariat of the Synod, 2024).

Menuju Model Negosiasi Budaya-Gerejawi yang Transformatif

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini mengusulkan bahwa kepemimpinan perempuan Katolik Manggarai dapat dipahami melalui model negosiasi budaya-gerejawi yang transformatif. Model tersebut berangkat dari kenyataan bahwa perempuan berada pada perjumpaan antara ekspektasi gender budaya dan peluang partisipasi yang berkembang dalam kehidupan Gereja. Perempuan tidak sepenuhnya ditentukan oleh struktur budaya, tetapi juga tidak bebas sama sekali dari pengaruhnya. Melalui keterlibatan pastoral, terutama dalam KBG dan stasi, mereka membangun pengalaman dan legitimasi kepemimpinan yang memungkinkan batas-batas tersebut dinegosiasikan secara bertahap.

Proses itu dapat dirumuskan sebagai: Ekspektasi Gender Budaya → Partisipasi Gerejawi → Agensi Perempuan → Kepemimpinan Akar Rumput → Legitimasi Komunitas → Negosiasi Budaya-Gerejawi → Transformasi Kepemimpinan. Model ini menempatkan agensi perempuan sebagai penghubung antara struktur budaya dan peluang gerejawi. Partisipasi pastoral menyediakan ruang, tetapi perempuan melalui agensinya mengubah ruang tersebut menjadi pengalaman kepemimpinan. Pengalaman kepemimpinan kemudian menghasilkan legitimasi komunitas yang berpotensi menantang asumsi bahwa otoritas publik secara alamiah merupakan domain laki-laki. Transformasi dengan demikian tidak selalu dimulai melalui perubahan struktural dari atas, tetapi dapat berkembang melalui akumulasi praktik kepemimpinan dari bawah.

Model tersebut sekaligus menawarkan perspektif yang berbeda terhadap hubungan antara Gereja dan budaya. Inkulturasi tidak hanya berarti Gereja mengakomodasi nilai budaya lokal, tetapi juga melibatkan discernment kritis terhadap unsur budaya yang mendukung atau membatasi martabat manusia. Dalam kasus Manggarai, proses tersebut tidak harus dibangun melalui penolakan terhadap kebudayaan lokal. Simbol perempuan sebagai *Iné*, *Siri Bongkok*, dan pembawa kehidupan menunjukkan adanya sumber budaya yang dapat didialogkan dengan visi Gereja mengenai martabat baptisan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama (Widyawati, 2024). Karena itu, transformasi kepemimpinan perempuan dapat berlangsung melalui dialog antara sumber-sumber emansipatoris dalam budaya lokal dan perkembangan eklesiologi sinodal.

Kontribusi utama penelitian ini dengan demikian terletak pada pemahaman bahwa kepemimpinan perempuan Katolik di Manggarai berkembang melalui negosiasi, bukan sekadar konfrontasi, antara budaya dan Gereja. Ekspektasi patriarkal tetap memiliki pengaruh, tetapi perempuan telah membangun ruang kepemimpinan melalui praktik pastoral dari akar rumput. Gereja lokal pada gilirannya menjadi arena tempat pola gender dapat direproduksi sekaligus ditransformasikan. Semakin besar kemampuan Gereja mengenali, membentuk, dan menginstitusionalisasikan kepemimpinan yang telah tumbuh dari KBG dan stasi, semakin besar pula kemungkinan partisipasi perempuan berkembang menjadi tanggung jawab gerejawi yang lebih luas. Dalam perspektif ini, *grassroots ecclesial agency* bukan hanya strategi pemberdayaan perempuan, tetapi salah satu jalan konkret menuju komunitas Gereja yang semakin partisipatif, sinodal, dan bertanggung jawab bersama.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam komunitas Katolik Manggarai berkembang di tengah perjumpaan yang dinamis antara ekspektasi gender budaya dan ruang partisipasi gerejawi. Pola yang mengasosiasikan otoritas publik dan pengambilan keputusan dengan laki-laki masih memengaruhi persepsi dan praktik kepemimpinan, tetapi tidak sepenuhnya membatasi agensi perempuan. Di Paroki Santu Antonius Padua Mbeling, perempuan justru menjadi aktor penting dalam liturgi, katekese, organisasi, KBG, dan stasi serta menunjukkan kemampuan nyata dalam mengorganisasi umat, menjalankan program, dan menyelesaikan persoalan komunitas. Temuan ini memperlihatkan bahwa perempuan bukan sekadar penerima struktur budaya dan gerejawi, melainkan subjek aktif yang membangun legitimasi kepemimpinan melalui pelayanan dan pengalaman komunitas. Namun, keterwakilan perempuan dalam struktur kepemimpinan formal, keberanian menyampaikan pandangan yang berbeda, beban domestik, pengaturan kegiatan, dan terbatasnya pembentukan kepemimpinan menunjukkan bahwa proses transformasi tersebut belum sepenuhnya selesai.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pemahaman kepemimpinan perempuan sebagai proses negosiasi budaya-gerejawi yang transformatif. Proses tersebut bergerak melalui ekspektasi gender budaya → partisipasi gerejawi → agensi perempuan → kepemimpinan akar rumput → legitimasi komunitas → negosiasi budaya-gerejawi → transformasi kepemimpinan. KBG dan stasi menjadi ruang penting bagi berkembangnya grassroots ecclesial agency, tempat perempuan membangun pengalaman dan legitimasi kepemimpinan dari bawah. Perspektif ini menunjukkan bahwa transformasi tidak harus berlangsung melalui penolakan terhadap budaya Manggarai, tetapi melalui dialog kritis dengan unsur budaya yang membatasi perempuan sekaligus penguatan nilai-nilai lokal yang menghargai martabat dan peran perempuan. Gereja lokal dengan demikian dapat menjadi ruang tempat pola gender yang diwariskan tidak hanya direproduksi, tetapi juga ditafsirkan kembali dalam terang martabat baptisan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama dalam Gereja yang sinodal.

Berdasarkan temuan tersebut, paroki dan Keuskupan Ruteng direkomendasikan untuk mengidentifikasi dan mendampingi perempuan yang telah menunjukkan kapasitas kepemimpinan di KBG dan stasi, menyediakan pelatihan dan mentoring kepemimpinan yang berkelanjutan, serta membangun jalur kaderisasi yang menghubungkan kepemimpinan akar rumput dengan tanggung jawab pada tingkat paroki. Praktik organisasi seperti waktu dan tempat rapat juga perlu mempertimbangkan tanggung jawab keluarga, sementara forum pastoral perlu semakin membangun budaya mendengarkan yang memungkinkan perempuan tidak hanya hadir dan berbicara, tetapi juga mengajukan gagasan serta berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Dialog mengenai kepemimpinan perempuan perlu melibatkan laki-laki, keluarga, pemimpin adat, dan pemimpin Gereja agar transformasi tidak dipahami sebagai agenda perempuan semata, melainkan sebagai proses bersama menuju komunitas yang lebih partisipatif. Karena penelitian ini terbatas pada satu paroki pedesaan, penelitian selanjutnya perlu membandingkan pengalaman perempuan pada beberapa paroki, wilayah budaya, dan tingkat kepemimpinan gerejawi untuk menguji sejauh mana model negosiasi budaya-gerejawi dan grassroots ecclesial agency dapat menjelaskan dinamika kepemimpinan perempuan dalam konteks Gereja Katolik Indonesia yang lebih luas.

REFERENSI

- Bacher Martínez, C. B., & Cerda-Planas, C. (2025). Sinodalidad, liderazgo y mujeres en la Iglesia local: Estudio de caso del Consejo Pastoral Zona Oeste de la Arquidiócesis de Santiago. *Cuestiones Teológicas*, 52(118), 1–24.
- Braun, V., & Clarke, V. (2022a). Conceptual and design thinking for thematic analysis. *Qualitative Psychology*, 9(1), 3–26. <https://doi.org/10.1037/qup0000196>
- Braun, V., & Clarke, V. (2022b). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE.
- Brazal, A. M. (2024). Asian women's participation in the synodal process. *Theology*, 127(4), 251–259. <https://doi.org/10.1177/0040571X241264150>
- Buss, M., Andler, S., & Tiberius, V. (2025). Female leadership: An integrative review and research framework. *The Leadership Quarterly*, 36, Article 101858. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2024.101858>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE.
- Eckholt, M. (2025). Synodality and the debate on the active participation of women in the Catholic Church. *Cuestiones Teológicas*, 52(118), 1–17. <https://doi.org/10.18566/cueteo.v52n118.a03>
- Francis. (2013). *Evangelii gaudium: Apostolic exhortation on the proclamation of the Gospel in today's world*. Libreria Editrice Vaticana.
- Francis. (2021a). *Spiritus Domini: Apostolic letter issued motu proprio modifying Canon 230 §1 of the Code of Canon Law regarding access of female persons to the instituted ministries of lector and acolyte*. Libreria Editrice Vaticana.
- Francis. (2021b). *Antiquum ministerium: Apostolic letter issued motu proprio instituting the ministry of catechist*. Libreria Editrice Vaticana.
- General Secretariat of the Synod. (2023). *A synodal Church in mission: Synthesis report of the first session of the XVI Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops*. General Secretariat of the Synod.
- General Secretariat of the Synod. (2024). *For a synodal Church: Communion, participation, mission: Final document of the XVI Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops*. General Secretariat of the Synod.
- Habur, A. M. (2026). “Is Synodality the Future of Catholic Education?” *Frontiers in Education* 11:1756162. <https://doi.org/10.3389/educ.2026.1756162>.
- Letsoin, Y. S., Sembiring, K., & Suhartini, Y. E. (2024). The womanhood of Roko Molas Poco rite in Manggarai's patriarchal culture: A discourse on Simone de Beauvoir. *Perspektif*, 19(1), 99–113. <https://doi.org/10.69621/jpf.v19i1.214>
- Mahardika, A. P. P., & Tanjung, L. P. (2024). Kepemimpinan perempuan dalam Gereja: Membongkar mitos dan meninjau realitas. *Media: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 5(2), 181–204. <https://doi.org/10.53396/media.v5i2.301>
- Medina, M. M. (2025). El liderazgo femenino en una Iglesia sinodal: Hacia una participación plena de la mujer en las decisiones, ministerios y ámbitos de gobierno. *Revista Albertus Magnus*, 16(2), 84–110. <https://doi.org/10.15332/25005413.11332>
- Monteiro, Y. H., & Widyawati, F. (2024). Paus Fransiskus dan kepemimpinan perempuan dalam Gereja Katolik. *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian*, 9(2), 147–162. <https://doi.org/10.21460/gema.2024.92.1193>
- Second Vatican Council. (1964). *Lumen gentium: Dogmatic constitution on the Church*. Libreria Editrice Vaticana.
- Second Vatican Council. (1965). *Apostolicam actuositatem: Decree on the apostolate of the laity*. Libreria Editrice Vaticana.
- Tupamahu, M. (2025). Kepemimpinan perempuan dalam Jemaat GPM Porto Saparua: Analisis

- ketimpangan gender dari perspektif teologis dan budaya. *KINAA: Jurnal Kepemimpinan Kristen dan Pemberdayaan Jemaat*, 6(2), 99–112. <https://doi.org/10.34307/kinaa.v6i2.202>
- Undat, R., Renleeuw, D. A., Hardiyanto, A., Dani, K., Baka, Y. J., Bria, F. D., Senda, S. S., Jegalus, N., & Subani, Y. (2025). Transformasi hidup perempuan Samaria dalam Yoh 4:1–42 sebagai inspirasi transformasi sosial perempuan Manggarai. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(4), 160–166. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i4.4960>
- Widyawati, F. (2024). Source of life, main pillar, and active outsider: Women and indigenous religion in contemporary Manggarai, Eastern Indonesia. *Anthropos*, 119(2), 465–476. <https://doi.org/10.5771/0257-9774-2024-2-465>
- Widyawati, F., Lon, Y. S., & Midun, H. (2026). Women leadership in Catholic Church in Indonesia. *Asian Women*, 42(1), 183–198. <https://doi.org/10.64446/aw.2026.3.42.1.183>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE.